

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Dari hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun periode 2004-2011.
2. Ketergantungan keuangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun periode 2004-2011.
3. Rasio kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun periode 2004-2011.
4. Rasio efektivitas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun periode 2004-2011.

5.2. Keterbatasan penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang diharapkan dapat memberikan arahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik serupa. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sehingga hasil penelitian ini masih kurang maksimal pada pertumbuhan ekonomi daerah kota lainnya.

2. Penelitian ini masih menggunakan variabel derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian dan rasio efektivitas diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penambahan variabel sehingga nantinya dapat mengukur secara komprehensif terhadap pertumbuhan ekonomi.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Banyuwangi harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat atau propinsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu lebih berusaha lagi untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi-potensi daerah dan pengembangan potensi daerah baik dengan melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi.
3. Pemerintah seharusnya dapat meningkatkan investasi dengan memberikan insentif bagi investor yang akan menginvestasikan modalnya di Kabupaten Banyuwangi seperti dengan memberikan keamanan dalam berinvestasi, bunga yang tinggi dan lain sebagainya
4. Pemerintah daerah seharusnya melakukan evaluasi pemanfaatan potensi daerah baik berupa komoditas unggulan, pajak, retribusi, sumberdaya yang

dimiliki dan sebagainya agar pemanfaatannya optimal sebagai sumber pendapatan daerah. Eavaluasi digunakan untuk melakukan peningkatan kualitas dari potensi yang dimiliki serta sebagai pengontrol terhadap pemanfaatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, edisi pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- _____. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, edisi pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Andreas dan dwi, 2010. "Analisis Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo". *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra. Kulon Progo
- Bastian, Indra, 2001. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada.
- Criswardani Suryawati, 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008, "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin". *Jurnal*.
- Karya Setya Azhar, Mhd. 2008. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah" skripsi. Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2012 . *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010. Jakarta : Salemba Empat
- Mahsun dkk. 2011 . *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : BPF
- M. Muh. Nasir, Saichudin dan Maulizar. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo*. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 5 No. 4, Agustus 2008. Lipi. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

_____. Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah

_____. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59)

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sadono Sukirno, 1994, *Makroekonomi Modern*. Penerbit Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Sri Aditya N. P, 2010. *Analisis Ketimpangan antar Wilayah dan Faktor-Faktor
yang Mempengaruhinya dengan Model Panel Data (Studi Kasus 35
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2007)*. Skripsi.
Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di
Dunia Ketiga, Edisi kedelapan*. Erlangga: Jakarta.

Ulum, Ihyaul (2009). *Audit Sektor Publik*, edisi 1. Jakarta: Bumi Aksara

Umar, Husein, 1997. *Riset Akuntansi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wongdesmiwati, 2009. *Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di
Indonesia: Analisis Ekonometrika*.

www.banyuwangikab.go.id